

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SUNGAI KARANG MUMUS DI KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Aris Rinaldi Affandi¹

Abstrak

Pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus khususnya di wilayah Kelurahan Temindung Permai belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak sampah yang tersangkut di kolong rumah warga maupun di kolong jembatan. Kurangnya ketegasan dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sehingga kebersihan Sungai Karang Mumus belum dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus di wilayah Kelurahan Temindung Permai. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dari ketiga aspek tersebut terbentuk dua penilaian, yaitu masyarakat menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah baik dan kurang baik. Kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus khususnya di wilayah Kelurahan Temindung Permai belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hambatan-hambatan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: minimnya armada, peralatan, anggaran, dan kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan.

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat, Pengelolaan, Sampah Sungai Karang Mumus.*

Pendahuluan

Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan tempat tinggal yang nyaman dan lingkungan yang bersih dari berbagai pencemaran lingkungan serta limbah. Negara juga bertanggung jawab dalam penanganan masalah persampahan yaitu pengelolaan sampah. Seperti yang diatur dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arisrenaldi38@gmail.com

Amandemen UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Kemudian juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, dilihat dari aktivitas kehidupan yang sangat tinggi dapat menimbulkan bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan sekitar lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah yang kurang baik. Permasalahan pengelolaan sampah ini juga terjadi di Kota Samarinda, khususnya di sungai Karang Mumus di wilayah Kelurahan Temindung Permai. Sungai Karang Mumus merupakan anak sungai Mahakam yang mengalir dari utara ke selatan yang melintas di tengah-tengah Kota Samarinda. Sampai saat ini, sungai Karang Mumus mengalami kehilangan fungsi dan penurunan kualitasnya. Diketahui bahwa kondisi Sungai Karang Mumus telah menurun baik dari segi kualitas air maupun kondisi fisik sungai, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

Pemerintah Kota Samarinda sudah mengeluarkan peraturan yang terkait pada masalah persampahan. Seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Di dalam kedua peraturan ini menyebutkan tentang apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah melakukan kegiatan melalui Tim Sampah Angkutan Sungai yaitu membersihkan Sungai Karang Mumus setiap paginya dan menegur warga yang membuang sampah ke sungai. Seperti yang dilansir Prokal.Co, Rabu (3/8/2016) warga bersama petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda membersihkan Sungai Karang Mumus (SKM) di sekitar Jalan Jelawat. Tetapi pada kenyataannya, sampah-sampah yang larut dan berserakan di Sungai Karang Mumus kebanyakan bukan berasal dari daerah Kelurahan Temindung Permai, tetapi terbawa dari daerah lain, walaupun ada juga masyarakat Kelurahan Temindung Permai yang sadar ataupun tidak sadar membuang sampah di Sungai Karang Mumus. Masyarakat yang membuang sampah di Sungai Karang Mumus terkadang tidak mengetahui betapa bahayanya sampah yang dibuang sembarangan itu dan tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur hal tersebut dan sanksinya yang cukup berat.

Peran masyarakat dalam mewujudkan kebersihan Sungai Karang Mumus memang belum bisa terlihat hasilnya, karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya suatu kebersihan suka membuang sampah ke sungai. Kurangnya ketegasan, tanggung jawab serta kurang gencarnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tentang pengelolaan sampah

dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda membuat masyarakat tidak pernah sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan sehingga kebersihan Sungai Karang Mumus belum bisa terwujud. Oleh karena itu, masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Karang Mumus khususnya di Kelurahan Temindung Permai masih mengeluhkan banyaknya sampah yang berserakan begitu saja di sekitar pinggiran Sungai Karang Mumus maupun yang tersangkut di jembatan dan rumah warga yang dapat menimbulkan bau tidak sedap.

Mengingat permasalahan di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sejak tanggal 1 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Perubahan nomenklatur tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai instansi yang menangani masalah kebersihan sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat terimplimentasikan dengan baik, dan Sungai Karang Mumus dapat terwujud kebersihannya.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Sugihartono, dkk (2007:8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003:154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (focus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek.

Pengertian Kinerja Organisasi

Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenampilan atau berkarya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi tergantung pada banyak faktor (*Bates dan Holton* dalam Mulyadi, 2006:111). Pengertian kinerja organisasi menurut Mulyadi (2006:111), adalah hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tempat organisasi.

Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (Bastian, 2001:33) yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator berikut ini:

1. Indikator masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*output*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcome*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Yuwono dkk. (2002:53) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.

Atmosoeparto (2001:11-19) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seperti berikut ini:

1. Faktor eksternal yang terdiri dari:
 - a. Faktor politik
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor sosial
2. Faktor internal yang terdiri dari:
 - a. Tujuan organisasi
 - b. Struktur organisasi

- c. Sumber daya manusia
- d. Budaya organisasi

Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan atau manajemen Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:27) adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan, di mana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk tak bergerak.

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). Para ahli kesehatan masyarakat Amerika (dalam Notoatmodjo, 2007:188) membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Pengertian Pengelolaan Sampah

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian menurut Peraturan Daerah Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda meliputi:
 - a. Komponen Kognitif
 - b. Komponen Afektif
 - c. Komponen Konatif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Komponen Kognitif

Komponen kognitif merupakan salah satu komponen dari teori persepsi. Komponen kognitif Menurut Alport (dalam Bimo Walgito, 2003) adalah Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut. Dalam memberikan pendapat dan penilaian terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus khususnya di Kelurahan Temindung Permai, seseorang harus menggunakan sikap yang objektif dan tidak hanya melihat terhadap satu sisi saja tetapi melihat secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus rata-rata menjawab dengan jawaban bahwa kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah cukup baik tetapi ada beberapa hambatan yang menghambat kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda tersebut. Mereka melihat dan menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda tersebut dari sisi yang objektif yaitu melihat dari segala arah dan segala sisi. Hal ini cocok dengan teori komponen kognitif yaitu yang menyebutkan bahwa pandangan yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa memang benar adanya kalau Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda tersebut menerjunkan tim yang membersihkan dan memunguti

sampah yang ada di Sungai Karang Mumus. Tim tersebut bernama Tim Sampah Angkutan Sungai.

Kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah cukup baik, namun ada beberapa hambatan seperti minimnya anggaran, minimnya petugas yang membersihkan dan memungut sampah di sungai, dan kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan sehingga kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda belum dapat berjalan secara maksimal.

Hal ini sesuai dengan apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai. Dalam hal ini, masyarakat memberikan pandangan dan menilai kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara objektif, tidak menilai sesuatu dengan satu sisi saja tetapi menilai secara keseluruhan.

Masyarakat menilai bahwa kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus sudah cukup baik dan masih ada kekurangan. Mereka menilai bahwa kekurangan dari kinerja tersebut adalah bukan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda tidak bekerja secara sungguh-sungguh, tetapi karena beberapa hal yang dapat dimaklumi seperti: minimnya anggaran, minimnya petugas yang membersihkan sampah di sungai, kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan, dan hal-hal lainnya.

Komponen Afektif

Menurut Alport (dalam Bimo Walgito, 2003) afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluative yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Dalam hal ini, masyarakat menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui sisi subjektif. Yaitu menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tanpa mengetahui secara keseluruhannya seperti minimnya anggaran, minimnya sumberdaya manusia dan kendala-kendala lainnya.

Pandangan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai rata-rata menjawab dengan jawaban yang kurang baik. Mereka menilai kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda kurang baik, kurang tegas, kemudian mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan himbauan dari pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda untuk menjaga kebersihan dan memberikan pendidikan tentang pentingnya merawat Sungai Karang Mumus.

Dari hasil observasi yang saya lakukan selama sehari-hari memang benar bahwa tidak ada satupun dari Tim Sampah Angkutan Sungai yang

menyusuri wilayah Kelurahan Temindung Permai sampai daerah hulunya dan membersihkan sampah di Sungai Karang Mumus.

Persepsi masyarakat yang tinggal di wilayah hulu Kelurahan Temindung Permai yang menilainya secara subjektif dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap hambatan dan kendala dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas. Mereka menilai hanya dengan apa yang mereka lihat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sehingga pandangan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah sungai Karang Mumus hanya menimbulkan pandangan dan penilaian secara subjektivitas. Hal ini sesuai dengan komponen afektif, yaitu berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang.

Jadi dari hasil penelitian penulis bahwa Tim Sampah Angkutan Sungai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bekerja membersihkan sampah Sungai Karang Mumus hanya dari hilir Sungai Karang Mumus sampai dengan daerah Jembatan Gelatik sehingga masyarakat yang tinggal di daerah hulu Sungai Karang Mumus khususnya hulu Kelurahan Temindung Permai tidak pernah melihat ataupun merasakan hasil dari kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan menilainya secara subjektif

Komponen Konatif

Menurut Alport (dalam Bimo Walgito, 2003) komponen konatif merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap.

Warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang mumus menilai bahwa kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus masih kurang baik dikarenakan beberapa hal yaitu minimnya control dari pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam membersihkan sampah yang ada di Sungai Karang Mumus. Kemudian minimnya fasilitas seperti tempat sampah. Dalam membersihkan dan memunguti sampah yang ada di Sungai Karang Mumus, warga bekerja sama saling membantu untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan rutin yaitu seminggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan tiga minggu sekali. Pandangan yang dibarengi dengan tindakan merupakan sesuatu hal yang positif. Kemudian apa yang dilakukan warga termasuk dalam komponen persepsi, yaitu komponen konatif atau komponen perilaku.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Faktor Internal

Salah satu kendala dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah sumberdaya manusia yang minim seperti: minimnya petugas dan minimnya peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam membersihkan dan memunguti sampah di Sungai Karang Mumus. Kemudian kurangnya kesaadaran masyarakat terhadap kebersihan dan menjaga serta merawat lingkungan yang mengakibatkan pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus belum dapat berjalan secara maksimal.

Daerah yang dibersihkan oleh Tim Sampah Angkutan Sungai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yaitu dari daerah jembatan satu (daerah selili) sampai dengan jembatan gelatik. Untuk di wilayah Temindung Permai, Tim Sampah Angkutan Sungai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda hanya mampu membersihkan dari daerah Merak sampai dengan Gelatik. Untuk ke daerah hulu Kelurahan Temindung Permai, termasuk daerah Jl. Pemuda dan Jl. Panjaitan, tidak mampu membersihkan dan memunguti sampah Sungai Karang Mumus karena kekurangan armada dan peralatan yang merupakan bagian sumberdaya manusia. Selain itu, kendala lain dari Tim Sampah Angkutan Sungai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus adalah hanya bisa menegur warga yang membuang sampah di sungai dan tidak dapat menindak maupun memberikan sanksi.

Tim Sampah Angkutan Sungai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda tidak dapat menindak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai, tetapi hanya dapat menegur warga tersebut. Pihak yang sangat berwenang dalam menindak dan pemberian sanksi adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi pada realitanya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah ikut turun ke lapangan yaitu Sungai Karang Mumus untuk ikut membersihkan Sungai Karang Mumus maupun menindak dan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampa ke sungai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah tidak terimplementasikan dengan baik. Karena salah satu pasal dari Perda tersebut tidak dijalankan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik.

Faktor Eksternal

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa koordinasi maupun kerja bakti antara pihak Kelurahan maupun masyarakat bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di wilayah Kelurahan Temindung Permai belum ada. Pihak Kelurahan bersama-sama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan kegiatan-kegiatan tentang kebersihan hanya di sekitar TPS (Tempat Pembuangan Sampah) saja, dan untuk di Sungai Karang Mumus tidak pernah. Padahal hal tersebut sangat penting bagi terlaksananya Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Pengelolaan Sampah dan bagi kebersihan Sungai Karang Mumus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi, kerja bakti, maupun sosialisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Temindung Permai maupun masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus di wilayah Kelurahan Temindung Permai itu tidak pernah dilakukan. Kegiatan pembersihan Sungai Karang Mumus hanya dilakukan oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat bersama-sama dengan warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus di wilayah Kelurahan Temindung Permai. Kemudian pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang perubahan nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat mengenai komponen kognitif dapat terlihat dari pandangan masyarakat yang menilai bahwa kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah cukup baik, namun masih ada kendala maupun hambatan yang dimiliki sehingga kinerja tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.
2. Persepsi masyarakat mengenai komponen afektif dapat terlihat pada pandangan masyarakat secara subjektif terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus khususnya di Kelurahan Temindung Permai. Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus di wilayah hulu Kelurahan Temindung Permai menilai bahwa kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan kurang baik dan kurang tegas. Masyarakat tidak pernah melihat Dinas Kebersihan dan Pertamanan membersihkan dan memungut sampah yang ada di Sungai Karang Mumus di wilayah mereka tinggal sehingga mereka menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan kurang baik.
3. Persepsi masyarakat mengenai komponen konatif dapat terlihat pada pandangan masyarakat serta tindakan masyarakat terhadap pandangan tersebut. Masyarakat menilai bahwa kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan kurang baik seperti minimnya pengawasan. Masyarakat yang menilai hal ini tidak hanya memberikan pandangan tetapi juga melakukan kegiatan nyata dalam membersihkan Sungai Karang Mumus.
4. Persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus di Kelurahan Temindung Permai terbagi atas dua penilaian, yaitu penilaian secara objektif dan subjektif. Masyarakat yang menilai secara objektif, mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga kinerja tidak dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan yang menilai secara subjektif, mereka hanya menilai dan memberi pendapat tanpa mengetahui secara keseluruhan seperti kendala atau hambatan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah Sungai Karang Mumus khususnya di wilayah Kelurahan Temindung Permai.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda seperti hambatan yang dialami oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Salah satu kendala dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sumberdaya manusia yang minim seperti: minimnya petugas dan minimnya peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam membersihkan dan memunguti sampah di Sungai Karang Mumus. Kemudian tidak dapat menindak dan memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai karena wewenang itu ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yaitu koordinasi, kerja bakti, maupun sosialisasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bersama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan maupun elemen masyarakat yang tinggal di wilayah bantaran Sungai Karang Mumus. Koordinasi, kerja bakti, dan sosialisasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Temindung Permai dan elemen masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus di wilayah Temindung Permai tidak pernah dilakukan. Kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, elemen masyarakat, dan organisasi mahasiswa. Kemudian masyarakat tidak mengetahui perubahan nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Saran

1. Dalam meningkatkan kinerja, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus lebih transparansi dalam semua hal seperti: anggaran, sumberdaya manusia, fasilitas serta perlengkapan guna menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda itu sendiri sehingga harapan masyarakat dapat disesuaikan dengan kemampuan serta sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan merawat Sungai Karang Mumus, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi dan himbuan-himbauan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan merawat

Sungai Karang Mumus. Agar masyarakat disiplin dan kebersihan Sungai Karang Mumus dapat terwujud.

3. Untuk meningkatkan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus lebih melakukan pengawasan ke lapangan dan melakukan kerja bakti bersama warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus khususnya di wilayah Kelurahan Temindung Permai.
4. Untuk meningkatkan kinerja, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda membentuk koordinasi bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Temindung Permai dan dengan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus di wilayah Temindung Permai.

Daftar Pustaka

- Atmosoeparto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Gramedia
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Miftah, Toha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2006. *Manajemen Strategik (Perencanaan dan Manajemen Kinerja)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Walgito, Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, dkk. 2002. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: Gramedia.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda